

**ANALISIS KEBIJAKAN TRANSISI KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM
MERDEKA: TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI DI SEKOLAH
MENENGAH ATAS**

Elma Silvia Amnita¹, Erni Murniarti²

¹Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia

² Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia

¹elmasilviaamnita@gmail.com, ²erni.murniarti@uki.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the transition policy from Curriculum 2013 to Merdeka Curriculum in senior high school (SMA) in Indonesia, focusing on the challenges faced and the implementation strategies applied. The Merdeka Curriculum was introduced as a response to the need for education that is more flexible and oriented towards developing the character and competence of learners. This study uses a qualitative approach with a literature study method. Data collection was carried out by reviewing various literature sources including books, newspapers, and various articles/ journals on the internet. The results show that the main challenges in this transition include teachers' lack of understanding of the Merdeka Curriculum concept, limited supporting infrastructure, and resistance from schools and parents. Effective implementation strategies involve intensive training for educators, strengthening communication links between schools and parents, and adapting the curriculum according to the local context. This study concludes that despite significant challenges, implementing the Merdeka Curriculum can improve the quality of education if supported by comprehensive policies and active participation from all stakeholders.

Keywords: curriculum 2013, merdeka curriculum, policy

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dan strategi implementasi yang diterapkan. Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur termasuk dari buku, surat kabar, dan berbagai artikel/jurnal di internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam transisi ini meliputi kurangnya pemahaman guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta resistensi dari pihak sekolah dan orang tua. Strategi implementasi yang efektif melibatkan pelatihan intensif bagi tenaga pendidik, memperkuat hubungan komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua, serta adaptasi kurikulum sesuai dengan konteks lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan signifikan, penerapan Kurikulum Merdeka dapat meningkatkan

kualitas pendidikan apabila didukung oleh kebijakan yang komprehensif dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: kurikulum 2013, kurikulum merdeka, kebijakan

A. Pendahuluan

Perubahan kebijakan kurikulum merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia, bertujuan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan global, kebutuhan nasional, serta tuntutan masyarakat. Salah satu perubahan signifikan yang dihadapi sistem pendidikan di Indonesia adalah transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 diperkenalkan dengan fokus pada pendekatan berbasis kompetensi dan pengembangan karakter ini telah memberikan kontribusi positif namun juga menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Meskipun Kurikulum 2013 sudah diterapkan, masih ada sejumlah hambatan yang berdampak pada hasil belajar para siswa. Hal ini mencakup kesulitan dalam penggunaan media pembelajaran serta sistem penilaian yang lebih kompleks dibandingkan kurikulum yang lama, selain itu cara penyampaian materi pembelajaran yang ada saat ini juga belum terbukti

efektif (Firdaus dkk, 2022). Di tahun 2019, pemerintah Indonesia memperkenalkan sebuah kurikulum pendidikan yang dikenal sebagai Kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar (Marisa, 2021). Kurikulum Merdeka hadir sebagai respons terhadap evaluasi terhadap Kurikulum 2013, dengan tujuan utama memberikan kebebasan lebih kepada satuan pendidikan khususnya guru dalam mengelola pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan kebutuhan peserta didik (Purnawanto, 2022). Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan potensi individual peserta didik melalui pendekatan yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut mencakup pemahaman atau persepsi guru dan kesiapan guru dalam hal metode pengajaran dan dampak terhadap profesionalisme guru

(Indriani dan Marno, 2024), ketersediaan infrastruktur yang memadai dan sumber daya pendukung, serta adanya keberatan atau penolakan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan (Manggangantung, 2023).

Memahami dampak dari transisi ini merupakan kunci untuk memastikan bahwa sistem pendidikan yang akan datang adalah sistem yang lebih fleksibel, dinamis, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi peserta didik, serta mampu menghadapi tantangan masa depan. Dengan Kurikulum Merdeka, diharapkan akan terjadi transformasi penting dalam cara belajar, yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan peserta didik secara menyeluruh dan mempersiapkan mereka untuk mengatasi tantangan yang akan datang. Pendekatan yang lebih terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan peserta didik. Maka dari itu, alasan mengapa peneliti memilih subyek ini dimana transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka merupakan

perubahan kebijakan pendidikan yang signifikan di Indonesia, topik ini sangat relevan dan tepat waktu mengingat dampaknya yang luas terhadap peserta didik, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, penelaahan terhadap transisi ini bisa memberikan pemahaman mengenai dampak perubahan kurikulum terhadap mutu pendidikan dan pencapaian hasil belajar. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan tantangan-tantangan krusial yang terjadi selama peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuan lainnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyusun strategi implementasi yang efektif pada Kurikulum Merdeka yang tidak hanya efektif tetapi juga efisien, dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti ketersediaan sumber daya, ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan kesiapan sumber daya manusia yang terlibat. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi sumbangan penting untuk menunjang kesuksesan perubahan kurikulum di Indonesia, serta membantu meningkatkan kualitas pendidikan

nasional melalui penerapan Kurikulum Merdeka yang optimal.

B. Metode Penelitian

Studi ini menetapkan pendekatan kualitatif dengan mengadopsi analisis deskriptif dan merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menurut Hattarina (2022) penelitian kepustakaan bisa dipahami sebagai penelitian yang berfokus pada analisis karya tulis, termasuk yang telah diterbitkan maupun yang belum, sebagai dasar utama penelitiannya. Penelitian ini mengadopsi metode pengumpulan data melalui pencarian dan penelaahan informasi terkait topik dari beragam sumber seperti catatan, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber terkait.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka

Kurikulum 2013, yang dikenal juga sebagai K13 adalah program pendidikan resmi yang mulai diberlakukan di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2013/2014. Program ini didasarkan pada serangkaian aturan pemerintah yang menetapkan standar baru untuk

pendidikan, yang mencakup cara mengajar di sekolah dan materi yang diajarkan. Aturan-aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua sekolah di Indonesia memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana memberikan pendidikan yang baik dan konsisten kepada siswa.

Landasan Penerapan Kurikulum 2013 di Indonesia:

Landasan penerapan Kurikulum 2013 di Indonesia berakar pada peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara. Berikut beberapa landasan penerapan kurikulum 2013.

- a. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang berkualitas dan tersedia secara setara. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan Kurikulum 2013, namun UUD 1945 memberikan dasar filosofis dan konstitusional bagi segala kebijakan pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum.
- b. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dasar

- hukum untuk menciptakan kurikulum dan sistem pendidikan yang mengutamakan adaptabilitas kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perubahan zaman, yang merupakan konsep kunci dalam pengembangan Kurikulum 2013.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menetapkan peran serta tanggung jawab guru dalam proses pendidikan, yang mencakup pelaksanaan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Disini guru diharapkan untuk dapat menerapkan Kurikulum 2013 sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan menetapkan standar pendidikan nasional yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam pengembangan dan implementasi Kurikulum 2013. Standar ini memastikan bahwa kurikulum memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- 1) Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, menetapkan standar proses yang wajib diterapkan oleh sekolah, termasuk saat mengimplementasikan Kurikulum 2013.
 - 2) Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Menengah, menentukan standar isi yang menjadi acuan dalam pembuatan kurikulum dan materi pelajaran dalam penerapan Kurikulum 2013.
- Landasan hukum ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem pendidikan, termasuk kurikulum, guru, dan proses pembelajaran, beroperasi dalam kerangka yang jelas dan terstandarisasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Dalam proses implementasi kurikulum 2013 terdapat beberapa kritik. Dalam Puspita & Atikah (2023) dibahas bahwa kritik yang didapat

berasal dari berbagai pihak, termasuk Koordinator Publik ICW yang mengemukakan beberapa argumen penolakan terhadap Kurikulum 2013 diantaranya adalah karena proses pembuatan kebijakan yang dirasa tergesa-gesa dan mekanisme perubahan kurikulum yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu, Firdaus, dkk (2022) menjelaskan meskipun Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan yang mulia, pelaksanaannya seringkali tidak berjalan lancar dan masih banyak hambatan yang berdampak pada hasil belajar siswa, termasuk masalah penggunaan media pembelajaran dan sistem penilaian yang kompleks. Metode pembelajaran yang digunakan juga dinilai belum efektif. Menanggapi kritik tersebut dan dalam upaya mengatasi hambatan yang terjadi selama penerapan Kurikulum 2013, maka pemerintah mengumumkan pengembangan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari kebijakan baru dalam bidang pendidikan.

Landasan Penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia

Landasan pengembangan dan implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan berdasarkan pada

Perundangan-undangan, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Berikut beberapa landasan yuridis penerapan Kurikulum Merdeka (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2024).

- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahan yang tercantum dalam PP Nomor 4 Tahun 2022.
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan revisi dari Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Penerapan Kurikulum Merdeka dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Keputusan No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum dalam Rangka Pemulihan proses pembelajaran Sherly & Sihombing (2020) menjelaskan Kurikulum Merdeka yang dirancang ini bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan dengan memberikan kebebasan kepada sekolah dengan menentukan sendiri cara menilai kompetensi dasar yang diajarkan kepada peserta didik. Kurikulum ini diharapkan dapat membentuk peserta didik yang cerdas, tangguh, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai nasional. Kebebasan yang diberikan kepada guru dan peserta didik diharapkan dapat mendorong inovasi dan kemandirian. Selain itu, kurikulum ini dirancang untuk memudahkan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, menyenangkan, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi setiap individu peserta didik sehingga dapat terjadi pengembangan karakter dan kompetensi literasi dan numerasi yang berlandaskan nilai-nilai

Pancasila (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2024).

Beberapa Perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka.

No	Aspek	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka
1.	Kerangka Dasar	Berlandaskan tujuan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Standar Nasional Pendidikan.	Berlandaskan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Standar Nasional, tetapi juga berfokus mengembangkan Profil Pelajar Pancasila (P3).
2.	Kompetensi yang Dituju	Terdiri dari Kompetensi Dasar (KD) yang dibagi menjadi empat Kompetensi Inti (KI), meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan .	Tujuan Pembelajaran tertuang dalam Capaian pembelajaran (CP) yang disusun per fase dan dijelaskan dalam bentuk paragraf yang menjelaskan tentang

No	Aspek	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka	No	Aspek	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka
			pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan, memperbaiki, atau memperkuat kemampuan peserta didik.			kelas X.	pada kelas XI (Fase F) dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terus mengeksplorasi minat, bakat, dan kemampuan peserta didik tanpa terburu-buru mengambil keputusan sebelum masuk SMA.
3.	Pendekatan Pembelajaran	Metode pembelajaran yang digunakan berorientasi pada pencapaian kompetensi dengan pendekatan saintifik yang bertujuan untuk mengasah semua aspek kemampuan peserta didik.	Menerapkan metode pembelajaran yang lebih mengutamakan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar.	5.	Struktur Kurikulum (Jam Pembelajaran)	Menetapkan jumlah jam pembelajaran per minggu untuk setiap mata pelajaran, yang harus diikuti oleh semua sekolah.	Menentukan jumlah total jam belajar yang terkumpul dalam satu tahun, memberikan keleluasaan kepada unit pendidikan
4.	Peminatan	Peminatan dimulai sejak	Peminatan dimulai				

No	Aspek	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka	No	Aspek	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka
			untuk menyusun jadwal aktivitas belajar dengan cara yang fleksibel.			peserta didik dengan menggunakan berbagai jenis ujian dan pengamatan.	difokuskan pada pembentukan karakter peserta didik yang selaras dengan Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup berpikir kritis, kreativitas, dan karakter yang bertujuan untuk mengukur tidak hanya hasil belajar, tetapi juga proses dan kemajuan individu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan.
6.	Fleksibilitas dan Kontekstualitas	Lebih terpusat, dengan isi kurikulum ditentukan oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan secara seragam di seluruh Indonesia.	Menekankan prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum, memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengorganisasi pembelajaran.				
7.	Penilaian	Penilaian peserta didik dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku	Penilaian dijalankan secara komprehensif, termasuk aspek non-kognitif dan kognitif. Penilaian lebih				

Sumber: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (2024).

2. Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas

Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah langkah krusial dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Proses ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan mencakup:

a. Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud),

sebagai regulator memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kurikulum yang dapat diimplementasikan oleh sekolah di Indonesia dengan menyediakan panduan yang jelas dan sumber daya yang memadai, memastikan kualitas pendidikan yang tinggi dan mendukung inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional dan menjamin bahwa kurikulum ini dapat diterapkan secara efektif di seluruh sekolah. (Sekretariat GTK, 2024).

b. Kepala Sekolah sebagai Pimpinan, Qomariah & Maghfiroh (2022) menjelaskan

bahwa kepala sekolah memegang peran krusial sebagai seorang pemimpin yang bersemangat dalam mengembangkan institusi pendidikan diharapkan dapat menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sekolah dan mempromosikan aktivitas pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Kurikulum Merdeka. Selain itu, penting bagi sekolah untuk menjamin ketersediaan sumber daya termasuk fasilitas, infrastruktur, serta tenaga pengajar yang kompeten untuk mendukung Kurikulum Merdeka. Ini juga mengharuskan guru-guru memiliki kemampuan dasar dalam mengatasi kebutuhan pendidikan di zaman digital (Rahayu,2022). Sekolah juga dapat menerapkan pendekatan pembelajaran kolaboratif seperti *Project Based Learning* untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dan sekolah diharapkan untuk mengenali, menumbuhkan, dan memajukan potensi yang ada pada setiap peserta didik. Dengan demikian, sekolah dapat memberikan ruang bagi siswa

untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki dan dapat berkembang secara holistik.

- c. Guru**, memiliki peran kunci sebagai pelaksana dan pengembang kurikulum di tingkat kelas atau fase. Guru harus dilengkapi dengan kemampuan mengembangkan materi ajar yang fleksibel dan relevan, menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, melakukan asesmen yang mendukung pertumbuhan peserta didik secara keseluruhan, membimbing dan memberikan dukungan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran (Indriani & Marno, 2024). Selain itu, Husaeni dan Sukmayadi (2023) menjelaskan bahwa para pendidik juga berperan dalam membina karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Kurikulum Merdeka serta meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik sesuai dengan fokus Kurikulum Merdeka.
- d. Orang tua Peserta didik**, berperan sebagai pendukung dan pengawas dalam proses belajar

anak-anak mereka. Orang tua harus terlibat dalam kegiatan sekolah dan memberikan umpan balik yang dapat membantu meningkatkan implementasi kurikulum. Arifin dkk (2023) menekankan bahwa orang tua dan masyarakat dapat berperan dalam mendukung dengan cara, melaksanakan rapat, dialog atau aktivitas bersama yang mencakup partisipasi dari sekolah, orang tua, dan komunitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesepakatan bersama yang akan memperkuat dukungan terhadap penerapan Kurikulum Merdeka.

- e. Peserta Didik**, sebagai pusat dari proses pembelajaran diharapkan dapat mengambil bagian aktif dalam proses pembelajaran dimana Kurikulum Merdeka pembelajaran yang terfokus pada peserta didik (*student centered learning*), memajukan pembelajaran mandiri, membina keterampilan yang esensial untuk masa yang akan datang, serta membantu membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Profil

Pelajar Pancasila (Adla & Maulia, 2023).

Kebijakan Penerapan Asesmen dalam Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia memiliki beberapa kebijakan utama yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu kebijakan baru adalah penghapusan Ujian Nasional (UN) dan penggantian dengan Asesmen Kompetensi Dasar dan Survei Karakter yang dijalankan oleh sekolah masing-masing. Dalam sebuah artikel *online* yang ditulis Putsanra (2019) ditekankan bahwa kebijakan tersebut diperkenalkan pada tahun 2021 sebagai langkah dalam rangka pembaharuan sistem evaluasi pendidikan di Indonesia.

Asesmen yang terdapat dalam Kurikulum Merdeka merupakan elemen kunci dari kegiatan belajar mengajar, bertujuan untuk mengumpulkan data tentang tingkat pencapaian hasil belajar yang diharapkan oleh peserta didik. Dalam Darwin, dkk (2023) menegaskan bahwa terdapat tiga tipe asesmen yang diterapkan untuk menilai proses pembelajaran peserta didik dalam Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

a. Asesmen formatif, diterapkan untuk mengawasi dan memperbaiki metode pembelajaran, serta menilai pencapaian tujuan pendidikan secara periodik, dijalankan di awal dan selama proses belajar untuk menilai kesiapan dan kemajuan peserta didik. Asesmen formatif menyediakan umpan balik yang berguna bagi peserta didik dan guru untuk memperbaiki kualitas pendidikan.

b. Asesmen Sumatif, bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan di akhir suatu periode. Dilaksanakan pada penutupan proses belajar untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan secara menyeluruh. Hasil dari asesmen sumatif dapat dijadikan acuan untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik.

c. Asesmen Autentik, digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi kemampuan peserta didik dalam menangani berbagai situasi pemecahan masalah yang realistis. Tipe asesmen autentik mencakup evaluasi performa, penilaian diri

oleh peserta didik, dan penilaian portofolio.

Melalui penerapan berbagai jenis asesmen, Kurikulum Merdeka bertujuan untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kemampuan dan hasil belajar peserta didik. Melalui pendekatan ini diharapkan lebih sesuai dengan konteks nyata yang dihadapi oleh peserta didik dan relevan dengan tuntutan dunia kerja saat ini. Oleh karena itu, penilaian tidak semata-mata mengevaluasi wawasan akademik, melainkan juga keahlian praktikal, kapasitas berpikir analitis, dan kesiapan peserta didik untuk terjun ke dunia kerja nyata. Hal ini mencerminkan komitmen Kurikulum Merdeka untuk mempersiapkan peserta didik dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan.

3. Tantangan Transisi dan Strategi Implementasi Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka

Transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan implementasi yang efektif.

Tantangan-tantangan yang dihadapi mencakup:

- a. Kesiapan Sumber Daya,** merupakan tantangan yang dihadapi terkait ketersediaan fasilitas, infrastruktur, dan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Merdeka (Qomariah & Maghfiroh, 2022). Sekolah harus memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif termasuk ketersediaan ruang kelas yang memadai, laboratorium, perpustakaan, dan berbagai media penunjang proses pembelajaran. Selain itu, pendidik perlu memiliki keahlian dan wawasan yang relevan untuk mengajar sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Dalam hal ini, melibatkan pemahaman mendalam tentang pemahaman pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan kesiapan tenaga pendidik untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran.
- b. Keberagaman peserta didik,** merujuk pada berbagai perbedaan yang ada di antara peserta didik, termasuk latar belakang sosial, budaya, bahasa,

dan kemampuan belajar (Hakiki, 2023). Dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas (SMA), penting mengakui dan menghargai keragaman agar pendidikan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Diharapkan dengan memperhatikan keragaman peserta didik, dalam proses pendidikan menjadi lebih efektif karena dapat menjangkau dan mengembangkan potensi setiap peserta didik secara maksimal, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan inklusif.

c. Kolaborasi dan dukungan stakeholder pendidikan,

menciptakan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak seperti pendidik, orang tua, dan komunitas adalah tantangan yang tidak kalah penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka (Pupita & Atikah, 2023). Setiap *stakeholder* memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam memastikan transisi kurikulum berjalan dengan baik. Guru sebagai pelaksana langsung kurikulum di kelas, memerlukan

pemahaman yang mendalam tentang cara efektif dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Selain itu, dukungan dari orang tua sangat penting dalam memotivasi dan mendukung pembelajaran anak-anak di rumah dan peran masyarakat termasuk sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan dukungan berupa sumber daya, keahlian, dan peluang pembelajaran yang beragam untuk peserta didik.

Untuk mengatasi tantangan di atas, strategi yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan implementasi Kurikulum Merdeka meliputi:

a. Pelatihan Guru, diharapkan guru dan kepala sekolah proaktif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan platform online seperti merdeka mengajar (PMM). Setiap guru dan kepala sekolah juga didorong untuk berpartisipasi dalam webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, yang bertujuan untuk memberikan panduan dan informasi terkini

tentang kurikulum (Hendriyanto, 2022).

b. Komunitas Belajar, guru dan kepala sekolah diharapkan untuk bergabung dalam komunitas belajar, di mana dalam komunitas tersebut dapat berbagi pengalaman, mendapatkan akses narasumber yang berkualitas, dan dapat memanfaatkan pusat layanan bantuan untuk mendalami aspek-aspek Kurikulum Merdeka (Hendriyanto, 2022).

c. Fleksibel, Menyediakan bahan ajar diferensiasi, dan pendekatan inklusif (Qomariah & Maghfiroh, 2022), kurikulum harus menyesuaikan dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman peserta didik, dimana setiap guru menyediakan materi pembelajaran dan metode pengajaran bervariasi untuk menjangkau kapasitas peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang namun terlepas dari hal tersebut, setiap peserta didik harus memiliki akses yang sama terhadap peluang belajar sehingga menimbulkan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

d. Akses informasi, untuk menciptakan sinergi yang baik dari guru, orang tua, dan masyarakat perlu akses informasi yang mendukung diantaranya guru dan kepala sekolah membutuhkan sumber belajar yang sesuai dan pelatihan yang cukup untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan (Hendriyanto, 2022). Orang tua harus mendapatkan informasi yang memadai mengenai Kurikulum merdeka agar bisa berkontribusi secara efektif dalam pendidikan anak-anaknya. Selain itu, kerjasama dengan komunitas dapat memperbaiki mutu pengalaman belajar bagi peserta didik dan menyediakan konteks nyata dalam penerapan kurikulum.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan sekolah akan lebih siap dalam menghadapi tantangan kesiapan sumber daya dan mampu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara efektif, sehingga mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

E. Kesimpulan

Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka berbeda secara mendasar

dalam pendekatan, struktur, dan implementasinya. K13 berfokus pada pengembangan Kompetensi Dasar (KD) dan Kompetensi Inti (KI), termasuk sikap sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Metode pembelajaran dalam Kurikulum 2013 menerapkan pendekatan saintifik dengan penilaian yang melibatkan berbagai dimensi peserta didik. Struktur Kurikulum 2013 lebih terpusat dan seragam, dengan jadwal pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan jumlah jam pelajaran per minggu yang tetap untuk setiap mata pelajaran.

Sebaliknya, Kurikulum Merdeka fokus pada pengembangan Profil Pelajar Pancasila (P3) dan tujuan pembelajaran yang tercantum dalam Capaian Pembelajaran (CP) per fase, yang dijelaskan dalam bentuk paragraf mengenai pengetahuan, sikap, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kurikulum Merdeka lebih fokus pada keterlibatan aktif siswa dan fleksibilitas dalam pengaturan pembelajaran oleh sekolah. Penilaian dalam Kurikulum Merdeka lebih terpadu, meliputi aspek kognitif dan

non-kognitif serta fokus pada pembentukan karakter peserta didik.

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA melibatkan kolaborasi Kementerian Pendidikan, kepala satuan pendidikan, guru, orang tua, dan siswa. Dalam Kurikulum Merdeka, Ujian Nasional ditiadakan dan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Dasar dan Survei Karakter. Selain itu, asesmen formatif, sumatif, dan autentik digunakan untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar secara komprehensif. Tantangan transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka melibatkan kesiapan sumber daya, keberagaman peserta didik, dan kolaborasi stakeholder pendidikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, strateginya meliputi pelatihan guru, pembentukan komunitas belajar, penguatan kurikulum, dan pengembangan teknologi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adla. S.R. & Maulia, S.T. (2023). Transisi Kurikulum K13 dengan Kurikulum Merdeka terhadap Hasil Belajar Siswa. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* Vol. 1, No 2.

- Arifin, Z., Kusumawati, A., & Rahman, A. (2022). *The involvement of parents and community in supporting the implementation of Merdeka Curriculum. Journal of Educational and Community Service*, 1(2), 86-95.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2024). *Kajian Akademik Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Darwin, D., Boeriswati, E., & Murtadho, F. (2023). Asesmen Pembelajaran Bahasa Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Pada Siswa SMA. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 12(2), 25-36.
- Dian Ihsan (2024). Tujuan dari Kurikulum Merdeka, Kemendikbud: Sekolah Bisa Transformasi. Retrieved from Tujuan dari Kurikulum Merdeka, Kemendikbud: Sekolah Bisa Transformasi (kompas.com)
- Firdaus, H., Hasanah, I. A., Laensadi, A. M., Matvayodha, G., & Siagian, F. N. (2022). Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka (Vol. 4).
- Hakiki, I. A. (2023). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka. Retrieved from Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka - Kompasiana.com.
- Hattarina, S. S. N. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Lembaga Pendidikan. *SENASSDRA*, 1, 181-192.
- Hendriyanto. (2022). 6 Strategi Sukseskan Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri. Retrieved from 6 Strategi Sukseskan Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri - Direktorat Sekolah Dasar (kemdikbud.go.id).
- Husaeni, M. Z., & Sukmayadi, Y. (2023). Studi Komparasi Peralihan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Seni Budaya SMA. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 5, No 6*.
- Indriani, S. M. dan Marno. (2024). Dampak Perubahan Kebijakan Kurikulum terhadap Guru. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 6, No 1*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Keputusan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaran Negara RI Tahun 2013.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Undang-Undang
- Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Manggangantung, J., & Sabanari, R. P. (2023). KURIKULUM MERDEKA DALAM PERSPEKTIF KAJIAN TEORI: ANALISIS KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SEKOLAH. *DIKSAR: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 31-42. Retrieved from <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/diksar/article/view/8011>
- Marisa, M. (2021). *Curriculum Innovation "Independent Learning" In The Era Of Society 5.0*. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 5(1), 67-78.
- Purnawanto, A. T. (2022). Perencanaan Pembelajaran Bermakna Dan Asesmen Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pedagogy* Vol 15, No. 1.
- Puspita, Y., & Atikah, C. (2023). Analisis perubahan kebijakan pendidikan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. *NOKEN, Jurnal Pengelolaan Pendidikan*, 4(1), 9-21.
- Putsanra, D. V. (2019). Ujian Nasional Dihapus, Diganti Asesmen Kompetensi dan Karakter. Retrieved from Ujian Nasional Dihapus, Diganti Asesmen Kompetensi dan Karakter (tirto.id)

Qomariyah, N., & Maghfiroh, M. (2022, December). Transisi kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka: peran dan tantangan dalam lembaga pendidikan. In Gunung Djati Conference Series (Vol. 10, pp. 105-115).

Rahayu, Restu. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basic Edu*, Vol. 6 No 4.

Sekretariat GTK. (2024). Kemendikbudristek Terbitkan Payung Hukum bagi Implementasi Kurikulum Merdeka secara Nasional. Retrieved from <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kemendikbudristek-terbitkan-payung-hukum-bagi-implementasi-kurikulum-merdeka-secara-nasional>.

Sherly, Dharma, E., & Sihombing, B, H. (2020). Merdeka Belajar: Kajian Literatur. Konferensi Nasional Pendidikan I, 184-187.